



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Asri binti Sadran, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 05 Oktober 1980, NIK 3511014510800002, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Kodedek RT. 21 RW. 06 Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 19 Desember 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso, 10 April 2006 (16 tahun 7 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulannya, alamat di Dusun Kodedek RT.21 RW. 06 Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro tersebut dengan calon istrinya bernama Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso, 19 September 2006 (16 tahun 2 bulan ), Agama Islam, alamat di Dusun Krajan RT. 08 RW. 03 Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro dengan calon istrinya telah bertunangan selama 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro telah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon istrinya bernama Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro dengan calon istrinya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera ;
7. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Statusnya Perawan dan Jejaka);
8. Bahwa Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro untuk menikah dengan calon istrinya bernama Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berkepentingan, agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro, di persidangan anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan ;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- setiap bulannya;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno;

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno, di persidangan telah memberikan keterangan;

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Mohammad Riris alias Riris bin Niro;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia telah dilamar oleh Mohammad Riris alias Riris bin Niro;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Mohammad Riris alias Riris bin Niro;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah mendapat lamaran dari Pemohon untuk menikahkan anaknya Mohammad Riris alias Riris bin Niro dengan anak kami yang bernama Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno dan kami terima;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Pemohon yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang telah dewasa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Asri binti Sadran) NIK : 3511014510800002; tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Asri binti Sadran Nomor : 3511012501110108 tanggal 02 Mei 2016 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mohammad Riris alias Riris bin Niro Nomor 474.2/516/430.11.1.12/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Ijazah SD atas nama Mohammad Riris alias Riris bin Niro Nomor DN-DD/06 2982173 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Gunungsari 2 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Hafidatul Rohmaniah (calon Istri anak Pemohon) nomor 470/518/430.11.1.12/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Nomor B-610/Kua.13.06.5/Pw.01/12/2022 tanggal 11 Desember 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.6

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro dengan calon istrinya yang bernama Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu erat hubungannya sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan Mohammad Riris alias Riris bin Niro terhimpun dalam satu keluarga dan Pemohon adalah orang tua/wali dari Mohammad Riris alias Riris bin Niro, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut memuat tentang Nomor Ijazah, nama peserta dan nama orang tua didik, tanggal lahir peserta didik dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta ada relevansinya dengan posita angka 1, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2015, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.5 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti-bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, cara berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah matang untuk melaksanakan pernikahan dan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan sangat erat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon merestui pernikahan anak Pemohon yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro dengan anaknya yang bernama Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno;
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan Rp 2.500.000,- setiap bulannya;
6. Terdapat kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon istrinya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut Negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

رء المفسد مقءم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mohammad Riris alias Riris bin Niro untuk menikah dengan Hafidatul Rohamaniah binti Sutrisno;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1444 Hijriyah oleh Saya Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim,

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Suria Akbar, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Meterai	:	Rp 10.000,-
Jumlah		Rp 295.000

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 1129/Pdt.P/2022/PA.Bdw